

PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MASA PANDEMI COVID-19

Jefri Liardi¹, Maria Montessori², Henni Muchtar³, Muhammad Prima Ersya⁴

^{1,2,3,4}Departemen Ilmu Sosial Politik, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

E-mail: jefriardi3@gmail.com, mariamontessori@fis.unp.ac.id

Corresponding Author: Maria Montessori

Email : mariamontessori@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program bantuan langsung tunai (BLT) dimasa pandemic. Program ini yang diharapkan mampu memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat yang terdampak oleh pandemi serta membangun kembali usaha yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Keterlaksanaan program dilihat dari dua masalah yaitunya pelaksanaan dan implikasi program BLT. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik dan alat pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Teknik analisis data yaitu melalui cara Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program bantuan langsung tunai masyarakat di Kenagarian Amping Parak terbagi dalam 5 tahap yaitu (a) pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan (CPB), (b) sosialisasi, (c) penyeleksian (verifikasi) data, (d) pengumuman penerima bantuan, (e) pencairan dana.

Kata Kunci: Program BLT, Kesejahteraan Masyarakat, Pandemi Covid

ABSTRACT

This study aims to describe the direct cash assistance (BLT) program during a pandemic. This program is expected to be able to improve the level of welfare of the people affected by the pandemic and rebuild businesses affected by the Covid-19 pandemic. The implementation of the program is seen from two problems, namely the implementation and implications of the BLT program. The type of research used is qualitative with a case study approach. Determination of informants in this study using a purposive sampling technique. Data collection techniques and tools by way of observation, interviews and documentation. Test the validity of the data using Source Triangulation and Engineering Triangulation. The data analysis technique is through data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the implementation of the direct cash assistance program for the community in Kenagarian Amping Parak was divided into 5 stages, namely (a) data collection and proposing prospective beneficiaries (CPB), (b) outreach, (c) selection (verification) of data, (d) announcement beneficiary, (e) disbursement of funds.

Keywords: BLT Program, Community Welfare, Pandemic Covid.



This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ©2022 by author.

PENDAHULUAN

Program BLT merupakan program bantuan yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat miskin (yang terkategori sebagai RTSM), dengan tujuan mendorong perekonomian masyarakat miskin, membangun tanggung jawab sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang secara konsisten dapat memperhatikan masyarakat miskin termasuk RTSM. Masalah kemiskinan merupakan masalah penting dan mendasar dalam upaya pembangunan di Indonesia. Menurut Selviana (2016) kemiskinan telah hadir dalam realitas kehidupan manusia dengan bentuk dan kondisi yang sangat memprihatinkan, Karena kemiskinan memang tidak bisa dihilangkan begitu saja. Keberagaman pandangan tentang kemiskinan menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi. Tingginya angka positif Covid-19 berdampak pada resesi ekonomi yang berujung pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia yang secara tidak langsung akan mempengaruhi kondisi kesejahteraan sosial masyarakat. Situasi ini dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat, terutama kelas menengah ke bawah.

Menurut Gorbiano et al, (2020) Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, melainkan juga pada kondisi sosial dan ekonomi. Pada sektor ekonomi, pandemi ini menyebabkan menurunnya aktivitas perekonomian di Indonesia dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian di beberapa wilayah melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) guna mencegah penyebaran yang lebih banyak. Hal ini berdampak cukup signifikan terhadap keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Interaksi sosial masyarakat dibatasi yang akhirnya membuat aktivitas ekonomi terganggu dan pekerjaan harian menjadi tidak bisa dilakukan seperti biasanya, sehingga berakibat pada penurunan penghasilan pada masyarakat.

Pandemi Covid-19 yang berkembajangan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan materiil masyarakat tidak dapat terpenuhi secara sah karena sulitnya pendapatan bagi golongan bawah. Kebutuhan spiritual sama dengan pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat tidak bisa menjalankan haknya untuk beribadah di tempat ibadah. Selain itu, kebutuhan sosial masyarakat juga terbatas akibat pandemi ini, keinginan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan individu lain bahkan kerabat tidak dapat terpenuhi karena untuk menghindari penularan klaster Terakhir Covid-19. Akibatnya masyarakat tidak dapat hidup sebagaimana mestinya dan tidak dapat berkembang dan memenuhi fungsinya sebagai makhluk sosial.

Dampak yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 juga dirasakan oleh masyarakat Amping Parak yang berprofesi sebagai nelayan, pedagang dan petani. Hal ini terlihat dari masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan kesulitan untuk menjual hasil tangkapannya karena ikan yang mereka jual sering kali tidak habis karena lemahnya daya beli masyarakat. Selain itu, para nelayan juga kesulitan untuk mengeksport ikan hasil tangkapannya keluar daerah akibat diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar. Hal itu menimbulkan terjadinya penumpukan ikan di gudang penyimpanan yang kemudian membusuk. Tentu saja permasalahan ini sangat merugikan para nelayan.

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga kelas. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam kelas I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Beasiswa Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu.

Saat ini masih ditemukan pembagian Bantuan Langsung Tunai yang tidak tepat sasaran. Artinya keluarga yang semestinya tidak boleh diberikan Bantuan Langsung Tunai, tetap mendapat bantuan tersebut. Sementara ada yang justru harus memperoleh Bantuan Langsung Tunai tetapi tidak mendapatkannya. Selain itu, BLT memberikan dampak yang tidak terlalu signifikan dalam mempertahankan daya beli kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak bagi pelaku usaha. Namun, dari segi sosial dapat memicu gejolak berupa konflik serta timbulnya korupsi dana BLT tersebut. Hal yang menarik dalam hasil survei nasional terkait bantuan sosial ini adalah dari 1.235 responden terdapat sebanyak 96% responden yang mengetahui bantuan sosial berupa pembagian bahan kebutuhan pokok (sembako), PKH dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk warga yang kurang mampu. Sebanyak 49% responden menyatakan program bantuan tersebut kurang/tidak tepat sasaran, dan sebanyak 37% responden menyatakan program bantuan sudah tepat sasaran.

Menurut Iin Seprina (dalam Putri 2021:2) Permasalahan dalam pemberian dana bantuan sosial adanya keterbatasan dana yang akan disalurkan sementara untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 ini dan terjadinya kemiripan data keadaan ekonomi dalam menerima bantuan sosial yang berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Selain itu adanya permasalahan lain adalah adanya subjektifitas pengambilan keputusan yang menyebabkan bantuan yang tidak tepat sasaran, permasalahan pada distribusi bantuan sosial adalah tidak meratanya distribusi bantuan kepada masyarakat miskin sehingga masih banyak bantuan yang belum tepat sasaran. Karena ketepatan sasaran akan menentukan efektifitas suatu program yang dilihat dari kesesuaian sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan aturan atau kriteria yang telah disepakati.

Permasalahan yang terjadi di lapangan adalah implikasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan miskin yang terdampak covid-19. Namun apakah bantuan tersebut telah digunakan dengan efisien oleh masyarakat sehingga program ini mampu meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang tidak tepat sasaran dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang belum tepat dan efisien. Menurut peneliti masalah ini sangat penting diteliti untuk mengetahui apakah BLT yang dikucurkan oleh pemerintah pada masyarakat dapat menjadi solusi untuk membantu perekonomian masyarakat pada masa pandemi covid-19. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian yaitu bagaimanakah pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan implikasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kenagarian Amping Parak, Kecamatan Sutera, Kabupaten Pesisir Selatan selama pandemi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2009: 4) bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan studi kasus dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan implementasi program BLT terhadap kesejahteraan masyarakat di Kenagarian Amping Parak Barat Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini adalah 15 orang masyarakat penerima bantuan program BLT, 1 orang Wali Nagari Amping Parak, 4 Orang Aparat Pelaksana, 3 Orang Tokoh Masyarakat, Teknik dan alat pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Alat yang digunakan Handphone, alat perekam suara dan kamera. yang menggunakan alat bantu berupa daftar pertanyaan tentang Implikasi program bantuan langsung tunai terhadap kesejahteraan di Kecamatan Sutera Kabupaten pesisir selatan. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan sebagai bahan referensi adalah dokumen yang berasal dari kantor wali nagari meliputi nama-nama penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan surat-surat yang berhubungan dengan bantuan langsung tunai di Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan Di Masa Pandemi.

Menurut UU tahun 2009 pasal 1 (1) tentang Kesejahteraan Sosial yaitu “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Tujuannya adalah tercapainya tingkat kehidupan masyarakat yang sejahtera, dalam artian kehidupan masyarakat dengan terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan (perumahan), serta kesehatan. Salah satu daerah yang menjalankan program BLT ini adalah masyarakat Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dengan jenis kegiatan program yang dilaksanakan yaitu Pembagian langsung bantuan tunai. Dengan jumlah penerima bantuan yaitu sebanyak 246 orang.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada RTSM yang telah mejadi peserta penerima BLT. Sesuai pedoman umum PKH, bahwa pembayaran bantuan bagi peserta BLT dilokasi baru dilakukan setelah ada surat penetapan dari pejabat berwenang. Jadwal pembayaran dan pelaksanaan pembayaran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan sesuai kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan. Sedangkan untuk pembayaran bantuan tahap berikutnya, dapat tetap dilaksanakan walaupun proses verifikasi belum dilaksanakan secara optimal. Pentingnya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat

merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan pokok material.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Van Meter Dan Van Horn (Zulkarnain, 2016) bahwa pelaksanaan sebuah program haruslah sesuai dengan standar, sasaran, dan tujuannya, karena hal ini merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan program karena hal ini menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Dalam aturan pedoman umum, mekanisme pelaksanaan penyaluran dana bantuan kepada RTSM/KSM Peserta BLT dilaksanakan melalui lembaga bayar bantuan tahap berikutnya, dapat tetap dilaksanakan walaupun proses verifikasi belum dilaksanakan secara optimal, dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga RTSM/KSM akan bervariasi pada setiap tahapan bantuan. Proses pencairan dana BLT biasanya dilakukan di desa talang duku penerima BLT dikumpulkan di Balai Desa dan mengantri untuk mendapatkan uang BLT. Adapun penggunaannya digunakan oleh peserta BLT, tidak diketahui secara pasti. Karena tidak dilakukan monitoring penggunaan dana tersebut digunakan oleh peserta BLT.

Pelaksanaan program BLT di Kenagarian tersebut dapat dikatakan sudah berjalan namun secara teknis masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya sehingga hal ini menjadi faktor penghambat program dalam mencapai sebuah tujuan yang diharapkan. Dalam pelaksanaannya program ini dilaksanakan dalam 5 tahap di mulai dari pendataan dan pengusulan Calon Penerima Bantuan (CPB), sosialisasi, verifikasi data, pengumuman penerima bantuan, pencairan dana dan pelaksanaan BLT.

Pelaksanaan sebuah program haruslah sesuai dengan standar, sasaran, dan tujuannya, karena hal ini merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam pelaksanaan program karena hal ini menentukan keberhasilan pelaksanaan program. Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara, serta studi dokumentasi yang telah peneliti lakukan sejak bulan November 2021 sampai bulan Desember 2021 menunjukkan bahwa pendataan dan pengusulan CPB dalam program ini adalah pihak Nagari Amping Parak melakukannya dengan cara mengusulkan nama-nama masyarakat yang telah didata sejak tahun 2020 dan pendataan yang dilakukan pada tahun 2020 adalah dilakukan belum secara keseluruhan. Artinya, pada tahap pendataan dan pengusulan data nama-nama CPB pihak nagari tidak lagi melakukan pendataan ulang sesuai dengan jenis kegiatan program BLT yang akan dilaksanakan. Sehingga, pada pengusulan data yang dilakukan oleh pihak nagari dalam program ini adalah masih dikatakan belum tepat pada sasarannya karena pengusulan dilakukan dengan menggunakan data-data lama tanpa melakukan pendataan ulang sesuai dengan jenis kegiatan program yang akan dilaksanakan didaerah tersebut berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan.

Menurut Grindle dalam Mulyadi, (2016) pendataan akan mempengaruhi keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang diharapkan Sebuah program dikatakan berhasil jika program yang dibuat dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, karena tingkat keberhasilan sebuah program itu tergantung pada

unsur pelaksanaannya yaitu kelompok sasaran pelaksana program. Namun, dalam pelaksanaannya program ini belum berjalan baik, karena belum tercapainya tujuan tujuan awal dari program tersebut yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara membantu kehidupan masyarakat dimasa pandemi ini. Sehingga, dapat dikatakan bahwa dengan adanya program BLT ini masyarakat penerima bantuan yang merupakan sasaran dalam program BLT tersebut merasa terbebani dengan mengharuskan masyarakat tersebut memiliki swadaya tambahan.

Sedangkan program ini dilaksanakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah yaitu masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap karena sebagian masyarakat Kenagarian Amping Parak adalah bekerja sebagai buruh tani yang tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan hidupnya bahkan untuk membeli sembako dimasa pandemi ini dengan menggunakan swadaya masyarakat itu sendiri. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan awal dari program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya dimasa pandemi. Karena ada sebagian masyarakat yang mengeluh terkait kurangnya pemenuhan dana setelah pencairan dana bantuan diberikan. Hal ini diakibatkan karena kelompok penerima bantuan tidak melaksanakan ketentuan program yang telah ditetapkan seperti sebagian masyarakat menggunakan untuk hal lain seperti membayar hutang dan membeli perabotan rumah tangga sehingga dana yang diberikan tidak mencukupi biaya untuk hariannya.

Menurut Arumdani (2021) dalam pelaksanaan program BLT ini pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan sangat penting untuk dilakukan oleh perangkat nagari selaku tim teknis program BLT didaerah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksana program BLT. Pendataan bertujuan untuk mengetahui masyarakatnya yang benar-benar membutuhkan bantuan ini sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu, pendataan calon penerima bantuan haruslah sesuai dengan tujuan dan sasaran pelaksanaan program agar program ini dapat mencapai standar rumah sesuai dengan yang telah direncanakan.

Pada tahap pendataan dan pengusulan data nama-nama CPB pihak nagari tidak lagi melakukan pendataan ulang sesuai dengan jenis kegiatan program BLT yang akan dilaksanakan. Sehingga, pada pengusulan data yang dilakukan oleh pihak nagari dalam program ini adalah masih dikatakan belum tepat pada sasarannya karena pengusulan dilakukan dengan menggunakan data-data lama tanpa melakukan pendataan ulang sesuai dengan jenis kegiatan program yang akan dilaksanakan didaerah tersebut berdasarkan surat keputusan yang telah dikeluarkan.

Menurut Barany (2020) Sosialisasi merupakan bentuk dari komunikasi yang bertujuan untuk tersampainya maksud yang diharapkan. Komunikasi itu

bermanfaat dalam pemberian informasi kepada seluruh pihak pelaksana program agar mereka memahami tujuan program sehingga mereka dapat bertanggung jawab untuk melaksanakan program secara efektif dilapangan. Jadi, dapat dikatakan bahwa penyampaian informasi antar pelaksana program itu sangatlah penting, karena semakin lancar komunikasi antar sesama pelaksana program maka program akan terlaksana dengan baik dan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Penyampaian informasi dalam pelaksanaan sebuah program sangat penting dan hal tersebut dapat dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi serta penyuluhan pada kelompok pelaksana program. Pelaksanaan program BLT yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 dan telah disosialisasikan sejak awal tahun 2021. Setelah pendataan langsung calon penerima bantuan (CPB) telah dilakukan oleh pihak di kenagarian selanjutnya data dikirim ke Pusat untuk dilakukan pengverifikasian (penyeleksian) data dari calon penerima bantuan. Tujuannya adalah untuk menetapkan masyarakat calon penerima bantuan yang benar-benar berhak menerima bantuan sesuai dengan tujuan SK (Surat Keputusan) yang telah ditetapkan.

Pengumuman penerima bantuan diumumkan melalui pihak Kenagarian Amping Parak yaitu pada tanggal 20 November 2021 yang dibuktikan dengan adanya surat keputusan dari PPK yang disahkan oleh KPA. Beberapa masyarakat mengatakan bahwa pencairan dana yang diterima adalah sebanyak Rp.600.000. Masyarakat penerima sangat antusias melaksanakan program ini tetapi masih ada sebagian masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan ini tapi tidak terdata sebagai penerima bantuan. Pencairan dana program BLT akan dilakukan jika penerima bantuan telah memenuhi salah satu syarat yaitunya penerima adalah masyarakat yang pekerjaannya terdampak oleh pandemi, penerima tidak terdaftar dalam penerima bantuan sosial yang lain, seperti, PKH, kartu sembako, bantuan pangan dan tunai BPNT, mempunyai anggota keluarga yang sakit kronis, dan seorang ibu yang tidak memiliki suami.

Kendala lain yang ditemukan dilapangan yaitu kurangnya pengarahan dari dilapangan. Para pelaksana program dituntut untuk tidak hanya mengetahui apa yang mereka laksanakan tetapi mereka juga dituntut untuk melaksanakan langsung program tersebut dilapangan dengan memberikan tanggung jawab yang penuh atas tugasnya. Sikap pelaksana dapat menentukan keberhasilan suatu program yang dilaksanakan, baik itu sikap pelaksana dari para aparat pemerintah, pemerintahan desa, pemerintahan kecamatan, pemerintahan kabupaten, tenaga pengelola, fasilitator dan juga masyarakat yang menjadi kelompok sasaran dalam pelaksanaan program BLT. Selain itu, dalam pelaksanaan program kesadaran masyarakat penerima terhadap program yang akan dilaksanakan juga sangatlah penting, karena dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap program tersebut masyarakat akan menjadi tahu dan paham mengenai program yang dilaksanakan. Sehingga, masyarakat bisa untuk mempersiapkan diri baik itu dari segi tenaga maupun dari segi dana untuk melaksanakan program ini dengan baik.

Kesadaran masyarakat penerima bantuan masih rendah, karena sebagian masyarakat masih saja menggunakan dana bantuan BLT sesuai dengan tujuan yaitunya membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan pokok hariannya. Akibatnya, hal ini menjadi kendala tersendiri bagi masyarakat penerima masyarakat karena masyarakat tersebut tidak memahami bahwa bantuan ini harus memiliki dana pendukung untuk memenuhi kebutuhan pokok harian mereka sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Jadi, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa tim teknis, tim fasilitator lapangan, serta masyarakat sebagai sasaran selaku implementor dalam pelaksanaan program sangat memiliki keterkaitan dan peran yang penting dalam pencapaian tujuan program yang telah direncanakan. Karena jika salah satu dari implementor program BLT tersebut tidak menjalankan implikasinya dengan baik maka tujuan program tidak akan dapat tercapai dengan efisien.

B. Implikasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan di Masa Pandemi.

Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu. Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan kemiskinan. Salah satu program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum adalah dengan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) mulai terlaksana melalui intruksi Presiden Nomor 12 tahun 2005, tentang “pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga miskin” dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga sasaran tujuan yang diharapkan melalui kebijakan program ini adalah dapat menjawab persoalan kemiskinan di Indonesia sebagai akibat dari segenap perubahan yang telah terjadi baik secara nasional maupun global.

PMK No. 190/07.2021 tentang BLT desa menjelaskan bahwa BLT desa merupakan pemberian uang tunai kepada keluarga miskin tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid-19. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa peningkatan kualitas hidup manusia serta pengurangan kemiskinan. Implikasi Bantuan Langsung Tunai Terhadap Masyarakat Miskin di kenagarian Amping Parak Bantuan langsung Tunai (BLT) memang tidak secara langsung berdampak pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program itu membawa manfaat bagi masyarakat.

Menurut Bustami (2020) Implikasi BLT terhadap kesejahteraan rakyat terlihat pada prioritas masyarakat miskin dimana penggunaan uang BLT paling utama

untuk membeli sembako. Hal ini menunjukkan bahwa belum efisien dalam memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dimana prioritas pengguna uang BLT tersebut masih untuk kebutuhan dasar namun BLT tersebut masih memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhan. Selain itu BLT terpengaruh terhadap kinerja masyarakat miskin karena masyarakat miskin tidak bisa hidup jika hanya menggantungkan penerimaannya pada BLT. Namun, Bantuan Langsung Tunai memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup bagi masyarakat miskin terutama dalam pemenuhan kebutuhannya. Satu sisi, kebijakan BLT ini mungkin akan memberikan dampak positif bagi masyarakat miskin dengan BLT, keseimbangan biaya hidup yang terdampak oleh pandemi Covid-19 secara langsung akan sedikit tertutupi dengan adanya Bantuan Tunai Langsung yang diberikan oleh pemerintah. Akan tetapi di sisi lain kebijakan BLT ini memiliki implikasi yang negatif juga yaitu kebijakan BLT ini akan berdampak pada perubahan perilaku dan karakter masyarakat, karena dengan adanya kebijakan ini membuat masyarakat menjadi malas dan terkesan bergantung pada BLT yang diberikan pemerintah.

Menurut Murdiana (2017) Pemberian bantuan terhadap masyarakat miskin merupakan hal yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk penentasan masalah kemiskinan agar kesejahteraan masyarakat meningkat namun kenyataan yang terjadi di masyarakat Bantuan Langsung Tunai bukan menjadi jawaban-jawaban permasalahan kemiskinan di Indonesia, karena dampak yang ditimbulkan bukan hanya sisi positifnya saja melainkan banyak juga membawa dampak negatif sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan langsung tunai itu dianggap belum maksimal dalam membantu perekonomian masyarakat.

Implikasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan di harapkan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan ditetapkan oleh pemerintah. Besaran bantuan yang diterima oleh rumah tangga miskin (RTSM) tersebut setidaknya dapat mengurangi beban kebutuhan hidup mereka khususnya terkait dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan bagi rumah tangga miskin (RTSM) di Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan difokuskan yaitu dengan pengolahan sumber daya alam manusia serta perangkat ekonomi dan kesehatan yang dilakukan secara bertanggung jawab, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terkait dengan sosialisasi Program Bantuan Langsung Tunai dalam strategi yang digunakan dalam mensosialisasikan Program BLT di Kenagarian Amping Parak Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, dilakukan secara bertanggung jawab, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Setiap kebijakan memiliki target yang ingin dicapai. Adapun target yang ingin dicapai dalam sosialisasi ini adalah penerima manfaat program BLT menjadi paham apa yang menjadi hak dan kewajiban ketika memperoleh bantuan BLT tersebut.

Simpulan

Pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) terhadap masyarakat di Kenagarian Amping Parak dilaksanakan dalam 5 tahap yaitu (a) pendataan dan pengusulan calon penerima bantuan (CPB), (b) sosialisasi, (c) penyeleksian (verifikasi) data, (d) pengumuman penerima bantuan, (e) pencairan dana dan implikasi Bantuan Langsung Tunai terhadap kesejahteraan masyarakat Kenagarian Amping Parak memiliki dua sisi dampak diantaranya dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu; kesejahteraan biaya hidup yang terdampak oleh pandemi Covid-19 secara langsung sedikit membantu biaya kebutuhan sehari-hari meskipun tidak sepenuhnya membantu. Diharapkan, pihak Nagari atau pengelola BLT, lebih tegas dalam mengenai prosedur program yang dilaksanakan. Seharusnya lebih ketat lagi dalam memberikan pengarahan pada masyarakat, serta adanya peninjauan kembali setelah jangka waktu pelaksanaan program dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA (Cambria 12 Huruf Kapital)

- Ahmadi, Rulam. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Arumdani, Nafida. (2021). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) di Desa Mojoruntut Kecamatan Krebung Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*. Vol. 2. (No. 5).
- Barany, LJ. 2020. Bantuan Sosial Ekonomi diTengah Pandemi Covid-19, <https://www.csis.or.id/>, diakses pada 18 agustus pukul 11.17.
- Bustami, Alek Wissalam. (2020). Pengaruh Covid-19 terhadap Perekonomian Masyarakat di Desa Pondok Kecamatan Bukit Kerman. *Jurnal Al-Dzahab* Vol. 1 (No. 1). 33-35.
- Chainar. (2020). Pandemi Covid-19, Perubahan Sosial dan Konsekuensinya pada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* Vol.25. (No. 1). 66-77.
- Gorbiano et al, (2020). Sosio Ekonomi Impacts of The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Untirta*, Vol. 2. (No.2). 31 -40.
- Hanoatubun, Silpa. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Edupsycouns*. Vol. 2. (No.1). 147-150.
- Marini, Dian. (2015). Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Masyarakat Miskin di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Jurnal FISIP*. Vol. 2. (No. 1). 2-5.
- Maun, Carly Erfly Fernando. (2020). Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin terkena Dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* . Vol. 1. (No. 2).
- Moleong, Lexy J. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakaryasa.
- Mulyadi, (2016). Dampak Bantuan Langsung Tunai bagi Perekonomian Masyarakat Desa. *Jurnal IJNHS*. Vol. 1. (No.1). 37-40.
- Murdiana. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Economics*. Vol. 5. (No. 2). 106-108.
- Selviana (2016). Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium*. Vol. 3. (No. 2). 126-132.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2009 pasal 1 ayat1.

- Wongkar, Claudia Clara Lusye. (2021), Bantuan Langsung Tunai Pemerintah kepada Masyarakat yang terkena Dampak Pandemi Covid-19 (Studi di Kelurahan Kakaskasen 1). *Jurnal Lex Administratum*. Vol. 9. (No.1). 38-40.
- Wynandin Imawan. (2016). Peran Pemerintah Desa dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai pada Masyarakat Minahasa Selatan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1. (No. 2). 5-10.